

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN KEPABEANAN DENGAN FISIK BARANG DALAM EKSPOR DAN IMPOR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Megister Hukum

Pada Program Studi Megister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

Dewi Sartika Simanungkalit

NPM: 22310008

PRODI STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

TE S I S

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN KEPABEANAN DENGAN
FISIK BARANG DALAM EKSPOR DAN IMPOR**

Diajukan oleh:

DEWISARTIKA SIMANUNGKALIT

NPM: 22310008

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 30 Juli 2024

Oleh

Pembimbing I



Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

TE S I S
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP
AKTUAL BARANG EKSPOR/IMPOR YANG TIDAK SESUAI
DENGAN DOKUMEN KEPABEAN

Di persiapan dan disusun oleh:

DEWI SARTIKA SIMANUNGKALIT
NPM: 22310008

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 30 Juli 2024

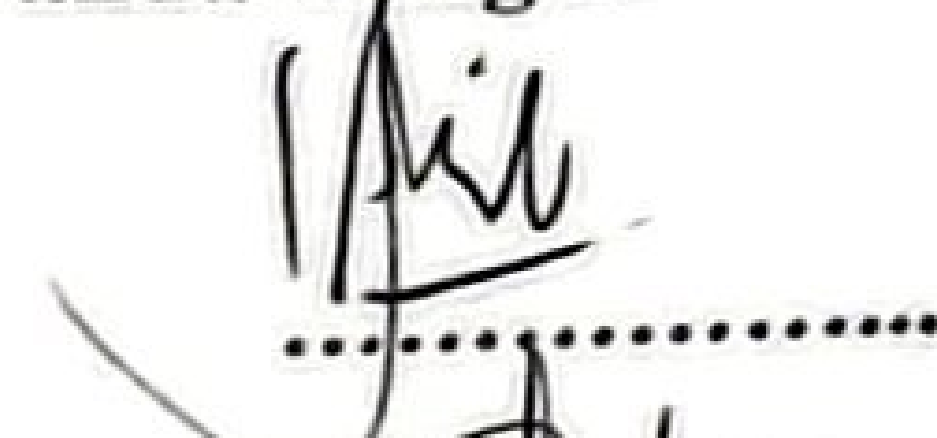
Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji

Tanda Tangan

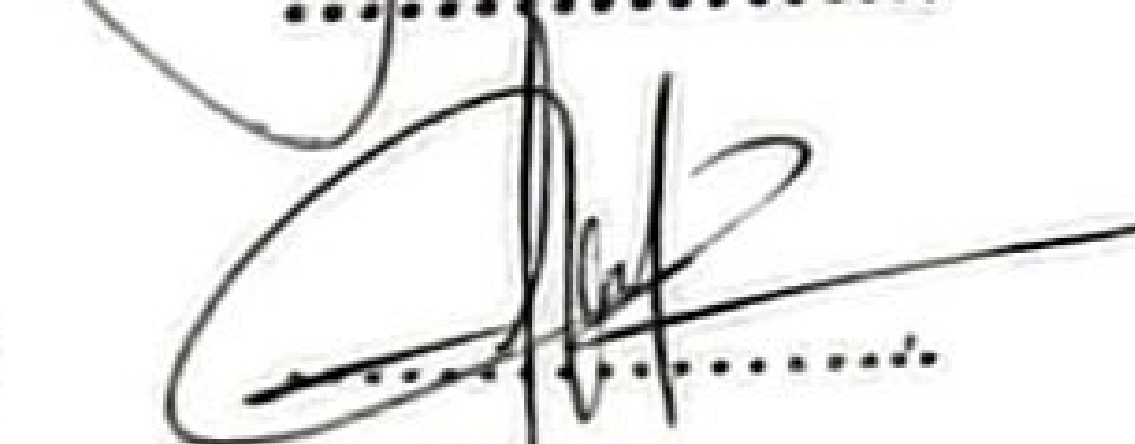
Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

Ketua



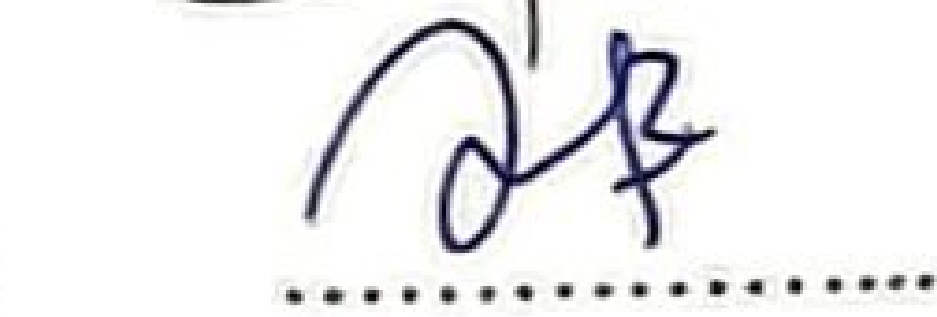
Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.

Anggota



Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.

Anggota



Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister
Tanggal 30 Juli 2024

Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini terselesaikan.
7. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.
8. Kepada seluruh Keluarga yang menjadi motivasi dan dorongan bagi penulis sehingga penulis harus menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Teman dekat penulis yang selalu menemani, dan turut berkontribusi memberikan waktu serta semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

10. Kepada rekan – rekan semua Mahasiswa Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2022 yang bersama-sama memberikan dukungan positif sehingga tesis ini terselesaikan.

Akhir kata, semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 06 Juli 2024
Yang menyatakan,

Dewi Sartika Simanungkalit
NPM: 22310008

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PERNGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.3 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Kajian Teoritis.....	7
1.4.1 Pertanggungjawaban pidana.....	7
1.4.2 Ketidaksesuaian dokumen.....	10
1.4.3 Fisik barang.....	13
1.4.4 Kepabeanan.....	16
1.5 Metode Penelitian.....	21
1.6 Sistematika Pertanggung jawaban.....	23
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN DAN FISIK BARANG DALAM EKSPOR/IMPOR	25
2.1 Pengaturan hukum terhadap ketidaksesuaian dokumen dengan fisik barang dalam ekspor impor.....	25
2.2 Penegakan hukum pidana terhadap pihak yang melakukan tindak pidana ketidaksesuaian dokumen dengan fisik barang dalam ekspor impor	37

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN DENGAN FISIK BARANG DALAM EKSPOR DAN IMPOR	43
3.1 Pertanggungjawaban Hukum pidana terhadap ketidaksesuaian dokumen dengan fisik barang.....	43
3.2 Prosedur dan Pelaksanaan Ekspor impor.....	57
BAB IV PENUTUP.....	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	65
DAFTAR BACAAN.....	66

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sartika Simanungkalit

NPM : 22310008

Alamat : Jl. Teluk semangka no. 76

No. WA : 0813 - 2323 - 2783

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN DENGAN FISIK BARANG DALAM EKSPOR DAN IMPOR” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 06 Juli 2024



DEWI SARTIKA SIMANUNGKALIT

NPM: 22310008

ABSTRAK

Pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana kepabeanan merupakan rangkaian kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional. Tanggung jawab ini mencakup berbagai kewajiban, mulai dari penyiapan dokumen yang benar hingga kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan. Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas, maka kegiatan ekspor impor dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hukum pidana dalam ekspor impor mengatur tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam kegiatan perdagangan internasional. Tujuannya untuk mencegah dan menindak segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan perdagangan internasional. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat merugikan negara, masyarakat, atau pihak-pihak lain yang terkait..

Dalam konteks perdagangan internasional, fisik barang merujuk pada karakteristik material dan estetika suatu produk yang dapat diverifikasi secara objektif, seperti dimensi, berat, dan kondisi kemasan.

Dokumen kepabeanan adalah kumpulan surat-surat resmi yang berisi data lengkap mengenai barang yang akan diekspor atau diimpor. Dokumen ini berfungsi sebagai izin resmi untuk memindahkan barang melintasi batas negara. Kepabeanan merupakan suatu sistem yang secara resmi mengatur lalu lintas barang yang melintasi batas wilayah suatu negara. Semua aktivitas kepabeanan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Hukum pidana, Fisik barang, dokumen kepabeanan

ABSTRACT

Accountability in customs offenses constitutes a series of obligations that must be borne by parties involved in international trade. This responsibility encompasses various obligations, ranging from the preparation of accurate documents to compliance with all applicable customs regulations. With clear accountability, export-import activities can be conducted safely, smoothly, and in accordance with applicable regulations.

Criminal law in export-import governs actions that violate the laws governing international trade. Its purpose is to prevent and punish all acts that contravene international trade rules. Violations of these rules can harm the state, society, or other interested parties.

In the context of international trade, the physical characteristics of goods refers to the material and aesthetic properties of a product that can be objectively verified, such as dimensions, weight, and packaging condition.

Customs documents are a set of official documents containing complete data on goods to be exported or imported. These documents serve as official permits to move goods across borders. Customs is a system that officially regulates the movement of goods across national borders. All customs activities are subject to applicable laws and regulations.

Keywords: Accountability, Criminal law, Physical characteristics of goods, Customs documents